



**Universitas Katolik Parahyangan Fakultas Ilmu Sosial
dan Ilmu Politik Program Studi Ilmu Hubungan
Internasional**

Terakreditasi A

SK BAN –PT NO: 3095/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2019

**Penolakan Yunani terhadap *Third Bailout Programme*
Uni Eropa dalam Upaya Menangani *Sovereign Debt*
Crisis pada *Third Bailout Referendum* tahun 2015**

Skripsi

Oleh

Jane Dwiputri

2013330006

Bandung

2020



**Universitas Katolik Parahyangan Fakultas Ilmu Sosial
dan Ilmu Politik Program Studi Ilmu Hubungan
Internasional**

Terakreditasi A

SK BAN –PT NO: 3095/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2019

**Penolakan Yunani terhadap *Third Bailout Programme*
Uni Eropa dalam Upaya Menangani *Sovereign Debt*
Crisis pada *Third Bailout Referendum* tahun 2015**

Skripsi

Oleh

Jane Dwiputri
2013330006

Pembimbing

Yulius Purwadi Hermawan, Ph.D.

Bandung

2020

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jurusan Hubungan Internasional
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional



Tanda Pengesahan Skripsi

Nama : Jane Dwiputri
Nomor Pokok : 2013330006
Judul : Penolakan Yunani Terhadap *Third Bailout Programme* Uni Eropa dalam Upaya Menangani *Sovereign Debt Crisis* pada *Third Bailout Referendum* tahun 2015

Telah diuji dalam Ujian Sidang jenjang Sarjana
Pada Rabu, 3 Juni 2020
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji

Ketua sidang merangkap anggota

Sylvia Yazid, Ph.D

Sekretaris

Yulius Purwadi Hermawan, Ph.D

Anggota

Elisabeth A. Satya Dewi, Ph.D.

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Jane Dwiputri

NPM : 2013330006

Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional

Judul Skripsi : Penolakan Yunani terhadap *Third Bailout Programme* Uni Eropa dalam Upaya Menangani *Sovereign Debt Crisis* tahun 2015

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya tulis ilmiah sendiri dan bukan merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. Adapun karya atau pendapat pihak lain yang dikutip, ditulis sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Bandung, 24 April 2020



Jane Dwiputri



**Universitas Katolik Parahyangan Fakultas Ilmu Sosial
dan Ilmu Politik Program Studi Ilmu Hubungan
Internasional**

Terakreditasi A

SK BAN –PT NO: 3095/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2019

**Penolakan Yunani terhadap *Third Bailout Programme*
Uni Eropa dalam Upaya Menangani *Sovereign Debt*
Crisis pada *Third Bailout Referendum* tahun 2015**

Skripsi

Oleh

Jane Dwiputri

2013330006

Bandung

2020

ABSTRAK

Nama : Jane Dwiputri
NPM : 2013330006
Judul : Penolakan Yunani terhadap *Third Bailout Program* Uni Eropa dalam Upaya Menangani *Sovereign Debt Crisis* pada *Third Bailout Referendum* tahun 2015

Penelitian ini mendeskripsikan mengapa pada tahun 2015 Yunani menolak *Third Bailout Programme* yang diberikan oleh Uni Eropa pada *Third Bailout Referendum*. Penelitian kualitatif ini memakai teori *Liberal Intergovernmentalism* dan konsep – konsep *national preferences*, *substantive bargaining*, *regional institution*, *sovereign debt crisis*.

Penelitian ini menemukan dua faktor utama penyebab penolakan Yunani pada tahun 2015. Faktor pertama adalah faktor politik, yaitu pemenuhan janji kampanye PM terpilih Alexis Tsipras. Faktor kedua adalah faktor sosial – ekonomi, yaitu dampak dari *austerity measures* yang berkepanjangan.

Pertama, faktor politik penolakan Yunani muncul dari kampanye calon Perdana Menteri, Alexis Tsipras. Kampanye berslogan “*Hope is Coming*” tersebut sangat sesuai dengan kondisi warga negara Yunani yang telah mengalami dampak berkepanjangan dari *austerity measures* dari awal krisis dimulai. Secara politik, *Third Bailout Referendum* adalah pemenuhan janji kampanye Tsipras yang menyuarakan bahwa negara telah mendapat luka yang mendalam selama krisis, prioritas utama adalah mengembalikan martabat warga dan Yunani. Faktor kedua adalah faktor sosial – ekonomi Yunani, secara sosial, terlihat dari meningkatnya total pengangguran. Banyaknya rumah tangga yang terkena dampak berkepanjangan *austerity measures*. Sedangkan secara ekonomi, yang menjadi faktor adalah ketergantungan bank – bank Yunani dengan ELA dan pembatasan penarikan uang tunai, menjadi penyebab. Kedua faktor tersebut yang menjadi dasar penolakan Yunani terhadap *Third Bailout Programme* melalui *Third Bailout Referendum*.

Dari deskripsi secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa negara Yunani tidak memiliki pilihan dalam konteks krisis, namun ingin menunjukkan kemampuan mereka dengan mengajukan permohonan untuk meminta kembali *Third Bailout Programme* dengan pengajuan *The Greek Reform Proposals* yang disusun oleh *Greece Ministry of Finance* dan ditandatangani oleh Menteri Keuangan Euclid Tsakalotos.

Kata Kunci: *Third Bailout Programme*, Uni Eropa, *Third Bailout Referendum*, *Sovereign Debt Crisis*.

ABSTRACT

Name : Jane Dwiputri
Student Number : 2013330006
Title : *Greece's Rejection of the Third Bailout Programme of the European Union in its Efforts to Deal with the Sovereign Debt Crisis in the Third Bailout Referendum in 2015*

This research describes why in 2015 Greece rejected the Third Bailout Programme provided by the European Union in the Third Bailout Referendum. This qualitative research uses Liberal Intergovernmentalism theory and the concepts of national preferences, substantive bargaining, regional institutions, and sovereign debt crisis.

This research found two main factors that caused Greece's rejection in 2015. First factor was political factor, fulfilment of the campaign promises of the elected Prime Minister Alexis Tsipras. Second was social – economic factor, that is the impact of prolonged austerity measures.

First, the political factor in Greece rejection arose from the Prime Minister Candidate Alexis Tsipras' campaign. The campaign, titled "Hope is Coming" is very corresponding with the condition of Greek citizens who have experienced the prolonged impact of austerity measures since the beginning of the crisis. Politically, the Third Bailout Referendum is a fulfilment of campaign promises of Tsipras', that voiced out Greece had received deep impacts since the crisis and the foremost priority was to restore the dignity of Greece and its people. The second, is the social – economic factor. Socially, seen from the increase of total unemployment. Also, the number of households affected by the prolonged austerity measures. While economically, the factor is the dependency of Greek banks with ELA and the limiting of cash withdrawals from Greek citizens, are the cause. These two factors are the basis of Greece's rejection of the Third Bailout Programme through Third Bailout Referendum.

From the overall description, it can be concluded that, Greece has no choice in the context of the crisis, but wanted to show their ability by submitting an application to request for the Third Bailout Programme. Greece submitted The Greek Reform Proposal, compiled by the Ministry of Finance, and signed by the Minister of Finance, Euclid Tsakalotos.

Keywords: Third Bailout Programme, European Union, Third Bailout Referendum, Sovereign Debt Crisis.

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas pimpinan – Nya dalam setiap langkah, hingga akhirnya penulis menyelesaikan Skripsi tepat pada waktu – Nya. Penelitian ini menjelaskan tentang penolakan Yunani terhadap *Third Bailout Programme* Uni Eropa dalam upaya menangani *Sovereign Debt Crisis* tahun 2015, dengan faktor politik dan faktor sosio – ekonomi sebagai faktor penolakan. Kasus *sovereign debt* Yunani merupakan topik yang menarik untuk dikaji. Negara tersebut bergabung dengan Uni Eropa pada tahun 1981 dan mendapatkan manfaat dari keanggotaannya di UE. Namun, setelah bergabung selama dua puluh delapan tahun, Yunani menghadapi krisis serius.

Penelitian ini memaparkan upaya Uni Eropa dalam mengatasi *sovereign debt crisis* dan secara khusus melihat posisi Yunani dalam merespons bantuan UE dalam bentuk *bailout programme*. Yunani menolak *Third Bailout Programme* dari UE pada tahun 2015 melalui *Third Bailout Referendum*. Penulis menemukan adanya faktor – faktor penolakan, yaitu faktor politik dan faktor sosio – ekonomi yang menyebabkan Yunani menolak bantuan dari UE.

Penulis mengucapkan Terima kasih melalui tulisan ini kepada Bapak Yulius Purwadi Hermawan, Ph.D sebagai Dosen Pembimbing yang telah memberikan arahan, saran dan kritik dalam proses penulisan Skripsi. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada pihak – pihak lain yang memberi dukungan hingga penulisan Skripsi ini selesai. Penulis menyadari bahwa penelitian ini belum sempurna dan masih membutuhkan kritik, saran dan masukan yang membangun untuk penelitian ini, Terima kasih.

Bandung, 24 April 2020



Jane Dwiputri

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
<i>ABSTRACT</i>	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR GRAFIK	vii
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR AKRONIM	ix
Bab I Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi Masalah	5
1.2.1 Deskripsi Masalah	5
1.2.2 Pembatasan Masalah	6
1.2.3 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
1.3.1 Tujuan	7
1.3.2 Kegunaan.....	8
1.4 Kajian Literatur	8
1.5 Kerangka Pemikiran	11
1.6 Metode Penelitian	22
1.6.1 Metode.....	22
1.6.2 Jenis Penelitian	22
1.6.3 Teknik Pengumpulan Data	23
1.7 Sistematika Pembahasan	23
Bab II Keanggotaan Yunani di Uni Eropa dan <i>Sovereign Debt Crisis</i> Yunani	26
2.1 Latar Belakang Bergabungnya Yunani ke Uni Eropa	27
2.1.1 Alasan Politik Yunani bergabung ke Uni Eropa	28
2.1.2 Alasan Ekonomi Yunani Bergabung ke Uni Eropa	30
2.2 Manfaat Ekonomi Keanggotaan Yunani dalam Uni Eropa	33
2.2.1 Perekonomian Yunani Sebelum Tahun 1980	34

2.2.2	Perekonomian Yunani setelah menjadi Anggota Uni Eropa.....	36
2.2.3	<i>Labour Market</i> Yunani Setelah Menjadi Anggota Uni Eropa	42
2.2.4	Pertumbuhan Ekonomi Yunani Setelah Menjadi Anggota Uni Eropa.....	44
2.3	<i>Sovereign Debt Crisis</i> Yunani	46
2.4	Respons Uni Eropa	50
2.4.1	<i>First Economic Bailout Programme</i> Yunani	51
2.4.2	<i>Second Economic Bailout Programme</i> Yunani.....	55
2.4.3	Awal Mula Penolakan <i>Third Bailout Programme</i> Yunani	56
Bab III Faktor Penolakan <i>Third Bailout Programme</i> oleh Yunani pada <i>Third Bailout Referendum</i> tahun 2015		60
3.1	Pemenuhan Janji Kampanye sebagai Faktor Politik Penolakan Program Bailout Ketiga	61
3.1.1	Perdebatan Legalitas <i>Third Bailout Referendum</i>	65
3.1.2	Daftar Resmi Keberpihakan Partai – Partai Politik di Yunani	67
3.1.3	Kejanggalan dalam Surat Suara Referendum Bailout Ketiga 2015	69
3.1.4	Hasil Penghitungan Suara Referendum Bailout Ketiga	72
3.2	Faktor Sosial – Ekonomi Penolakan Bailout Ketiga	76
3.2.1	Dampak <i>Austerity Measures</i> yang Berkepanjangan	77
3.2.2	Ketergantungan Perbankan Terhadap ELA (<i>Emergency Liquidity Assistance</i>)	81
3.2.3	Mengajukan Permintaan <i>Third Bailout Programme</i> Pasca Referendum Sebagai <i>Substantive Bargaining</i>	86
Bab IV Kesimpulan		119
DAFTAR PUSTAKA		123

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Ilustrasi <i>Liberal Intergovernmentalism</i>	14
Gambar 2.1	Program – Program Bailout untuk Yunani.....	51
Gambar 3.1	Slogan Kampanye Tsipras <i>Hope is Coming</i>	63
Gambar 3.2	Surat Suara Referendum Bailout Ketiga Yunani 2015.....	70
Gambar 3.3	Terjemahan Surat Suara Referendum Bailout Ketiga Yunani 2015.....	71
Gambar 3.4	Antrian <i>National Bank</i> 28 Juni 2015.....	83
Gambar 3.5	Surat Permohonan Menteri Keuangan Yunani untuk Mengajukan <i>Third Bailout Programme</i>	88
Gambar 3.6	Surat Balasan Resmi Ketua Dewan ESM.....	90

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1	Kerjasama Ekspor Yunani dan Jerman dari tahun 1975 – 1981....31
Grafik 2.2	Pertumbuhan GDP Yunani per tahun (1950 – 1984).....35
Grafik 2.3	Bagian dari Perdagangan Dunia (1980 – 2000).....39
Grafik 2.4	Peningkatan Kedatangan Wisatawan ke Yunani (1980 – 2000)...40
Grafik 2.5	Persentase Bagian Yunani dalam Pariwisata Internasional.....41
Grafik 2.6	Tingkat Persentase Pengangguran Eropa Selatan Tahun 1980 – 2000.....43
Grafik 2.7	Jumlah Persentase Wiraswasta dari Employment.....44
Grafik 2.8	<i>Budget Deficit</i> Yunani dari Persentase GDP.....48
Grafik 2.9	<i>Government Debt</i> Yunani dari Persentase GDP.....48
Grafik 2.10	Target Penurunan Defisit Umum Pemerintah Yunani 2006 - 2015.....55
Grafik 3.1	Tingkat Pengangguran Tahunan Yunani dan Area Eropa Lainnya.....78
Grafik 3.2	Persentase Rumah Tangga yang Terkena Dampak Berkepanjangan (Sisi Subjektif).....80
Grafik 3.3	Persentase Rumah Tangga yang Terkena Dampak Berkepanjangan (Sisi Objektif).....81
Grafik 3.4	Grafik Agregat Sektor Perbankan dan <i>Repurchase Agreement</i> Lembaga Keuangan Non – Moneter.....85

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Jenis dan Jumlah Ekspor Yunani ke Jerman Tahun 1975 – 1981..	32
Tabel 2.2	Penentu Pertumbuhan Ekonomi di Yunani (1980 – 2002).....	45
Tabel 3.1	Hasil Penghitungan Suara Referendum.....	72

DAFTAR AKRONIM

ADMIE	<i>Independent Power Transmission Operator</i>
ANEL	<i>The Independent Greeks</i>
ANTARSYA	<i>Anticapitalist Left Cooperation for the Overthrow</i>
BUMN	<i>Badan Usaha Milik Negara</i>
AQR	<i>Asset Quality Review</i>
CAP	<i>Common Agricultural Policy</i>
CEO	<i>Chief Executive Officer</i>
CFA Institute	<i>Chartered Financial Analyst Institute</i>
DIMAR	<i>Democratic Left</i>
DPS	<i>Athens Bar Association</i>
EBRD	<i>European Bank for Reconstruction and Development</i>
EC	<i>European Commission</i>
ECB	<i>European Central Bank</i>
EEC	<i>European Economic Community</i>
EFSF	<i>European Financial Stability Facility</i>
EKAS	<i>Solidarity Grant</i>
ELA	<i>Emergency Liquidity Assistance</i>
ELSTAT	<i>Hellenic Statistical System</i>
EMU	<i>European Monetary Union</i>
EOT	<i>Greek National Tourism Organization</i>
E.P.A.M	<i>United Popular Front</i>
EPP	<i>European People's Party</i>
ESH DHS	<i>National Public Electronic Procurement System</i>
ETEA	<i>Greece's Unified Supplementary Insurance Fund</i>
FRG	<i>Federal Republic of Germany</i>
GAO	<i>General Accounting Office</i>
GATT	<i>General Agreement on Tariffs and Trade</i>
GDFS	<i>General Dictatorates of Financial services</i>
GDP	<i>Gross Domestic Product</i>
GGR	<i>Gross Gaming Revenue</i>
GMI	<i>Guaranteed Minimum Income</i>
GPAC	<i>Good Practice Advisory Committee</i>
HRADF	<i>Hellenic Republic Asset Development Funds</i>
HV	<i>High Voltage</i>
ICT	<i>Information and Communication Technology</i>
IFS	<i>International Financial Statistics</i>
IKA	<i>Social Insurance Institute</i>
ILO	<i>International Labour Organization</i>
IMF	<i>International Monetary Fund</i>
INN	<i>International Nonproprietary Name</i>
IT	<i>Information Technology</i>
ITC	<i>Income Tax Code</i>
KEAO	<i>Center for the Collection of Social Insurance Payments</i>

KEDE	<i>Central Union of Municipalities of Greece</i>
KHMDHS	<i>Central Electronic Public Procurement Registry</i>
KKE	<i>Communist Party of Greece</i>
LDU	<i>Large Debtor Unit</i>
LI	<i>Liberal Intergovernmentalism</i>
LiTS	<i>Life in Transition Survey</i>
LOLR	<i>Lender of Last Resort</i>
MTFS	<i>Medium Term Financial Strategy</i>
NOME	<i>Nouvelle Organisation du Marché de l'Electricité</i>
NPL	<i>Non – Performing Loans</i>
OCW	<i>Out – Of – Court Work Out Mechanism</i>
OEC	<i>The Observatory of Economic Complexity</i>
OECD	<i>Organization for Economic Co – operation and Development</i>
OGA	<i>Agricultural Insurance Organization</i>
OTC	<i>On the Counter</i>
OTE	<i>Hellenic Telecommunications Organization</i>
PASOK	<i>Pan - Hellenic Socialist Movement</i>
PHK	<i>Pemutusan Hubungan Kerja</i>
PM	<i>Perdana Menteri</i>
PPC	<i>Public Power Corporation</i>
POSDEP	<i>Pan – Hellenic Federation of Teachers and Research Association</i>
PPN	<i>Pajak Pertambahan Nilai</i>
Q1	<i>First Quarter: 1 January – 31 March</i>
Q2	<i>Second Quarter: 1 April – 30 June</i>
Q3	<i>Third Quarter: 1 July – 30 September</i>
Q4	<i>Fourth Quarter: 1 October – 31 December</i>
QMV	<i>Qualified Majority Voting</i>
SDIT	<i>Public Private Partnerships</i>
SDOE	<i>Greece's Financial Crimes Squad</i>
SSC	<i>Shared Services and Centralization</i>
SYRIZA	<i>The Coalition of The Radical Left</i>
SSFs	<i>Social Security Funds</i>
TEE – TCG	<i>Technical Chamber of Greece</i>
TPC	<i>Tax Procedure Code</i>
TRAINOSE	<i>Perusahaan Kereta Api Yunani</i>
UE	<i>Uni Eropa</i>
UU	<i>Undang – Undang</i>
VAT	<i>Value Added Tax</i>
VLT	<i>Video Lottery Terminal</i>
WEO	<i>World Economic Outlook</i>
WDI	<i>World Development Indicators</i>

Bab I

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

The Treaty on European Union yang dikenal juga dengan *Treaty of Maastricht*, ditandatangani oleh anggota – anggota *European Communities*. Penandatanganan berlangsung di Maastricht, Belanda pada 7 Februari 1992¹. *Treaty of Maastricht* mencakup keputusan dibentuknya *Economic and Monetary Union (EMU)*. EMU ini membawa UE selangkah lebih maju didalam integrasi ekonomi. Integrasi ekonomi membawa keuntungan yang besar, memiliki efisiensi internal dan ketahanan terhadap keseluruhan dari perekonomian UE dan perekonomian individual dari para negara anggota.² Dengan seiring berjalannya waktu, integrasi ekonomi memiliki beragam keuntungan seperti stabilitas ekonomi, pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan penawaran kerja yang tinggi, dimana hal – hal tersebut memiliki akibat langsung yang dirasakan oleh warga negara dari negara anggota UE. EMU ini yang membuat *Single Market* berjalan karena pergerakan penduduk, uang, barang dan jasa yang sudah tanpa hambatan diantara anggota – anggota UE.³

¹ *European Union*, “EUR-Lex - xy0026 - EN - EUR-Lex,” diakses 17 Oktober 2016, <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3Axy0026>.

² *European Commission*, “Economic and Monetary Union - European Commission,” diakses 22 November 2016, http://ec.europa.eu/economy_finance/euro/emu/index_en.htm.

³ *European Union*, “EUROPA - The History of the European Union,” 16 Juni 2016, diakses 16 September 2016, https://europa.eu/european-union/about-eu/history_en.

European Central Bank atau ECB merupakan bank sentral dari UE, ECB memiliki fungsi untuk mengatur suplai keuangan UE serta mengelola kebijakan – kebijakan moneter di *Eurozone*.⁴ ECB memiliki peran yang sangat krusial karena termasuk salah satu dari tujuh institusi lainnya yang ada di dalam UE. ECB mengelola kebijakan – kebijakan moneter dari 19 negara anggota UE dan mengelola mata uang *Euro* yang merupakan salah satu mata uang yang digunakan dengan luas. *Eurosystem*, terdiri dari ECB dan bank sentral nasional dari negara – negara anggota ECB yang menggunakan mata uang *Euro*, dengan demikian merupakan otoritas moneter dari area *Euro*. Semua yang tercakup dalam *Eurosystem* memiliki tujuan untuk menjaga stabilitas harga demi kebaikan dan kemakmuran bersama.⁵ *Eurosystem* bertindak sebagai otoritas keuangan untuk menjaga stabilitas keuangan dan memelopori serta mempromosikan integrasi keuangan di Eropa.

Setelah Traktat Maastricht diberlakukan tahun 1993, maka muncul *Maastricht Convergence Criteria* yang menyatakan bagi negara – negara yang akan bergabung dalam *Euro* harus memiliki perekonomian yang teratur.⁶ *Stability and Growth Pact* yang dikeluarkan pada tahun 1997 menyatakan bahwa setiap negara diharuskan kepatuhan fiskal yang berkelanjutan. Setiap negara yang akan bergabung dalam *Euro* harus memiliki spesifikasi tertentu, memastikan inflasi

⁴ *European Central Bank*, “Tasks,” *European Central Bank*, diakses 21 September 2016, <https://www.ecb.europa.eu/ecb/tasks/html/index.en.html>.

⁵ *European Central Bank*, “Eurosystem mission,” *European Central Bank*, diakses 21 September 2016, <https://www.ecb.europa.eu/ecb/orga/escb/eurosystem-mission/html/index.en.html>.

⁶ *Council on Foreign Relations*, “The Eurozone in Crisis,” *Council on Foreign Relations*, diakses 22 November 2016, <http://www.cfr.org/eu/eurozone-crisis/p22055>.

negaranya dibawah 1,5%, defisit anggaran negara dibawah 3% dari GDP, dan rasio hutang negaranya terhadap GDP kurang dari 60%. Dikarenakan spesifikasi yang ketat, banyak negara menetapkan reformasi anggaran yang sangat ketat.

Sayangnya, ketika dalam prakteknya standar – standar tersebut tidak diaplikasikan secara konsisten sebagaimana harusnya, hal ini menjadi dasar munculnya berbagai permasalahan di masa depan. Jason Manolopoulos, penulis dari buku *Greece's Odious Debt*⁷ menyatakan bahwa adanya kelemahan terhadap uji kelayakan untuk menilai kesesuaian sebuah negara untuk bergabung dalam *Euro* dan juga adanya kelemahan dalam pengaplikasian peraturan yang seharusnya menjadi pengawas ketika sistem *Euro* diberlakukan. Hal ini terjadi karena para pejabat UE mengabaikan permasalahan ini secara tidak sengaja akibat dari menggebu – gebunya mereka untuk mengembangkan *Eurozone*.

Akibat dari permasalahan tersebut muncul beberapa tahun kemudian. Pada mulanya, para negara periferi berkembang dengan baik, karena didukung dengan akses yang mudah untuk meminjam dari negara anggota *Eurozone* lainnya.⁸ Namun, pada tahun 2007 – 2008 terjadi krisis keuangan global, ketika likuiditas mengering, mengungkap defisit yang *Unsustainable* serta hutang publik dalam jumlah besar. *Sovereign Debt Crisis* menyebar diantara negara – negara periferi pada tahun 2010, mulai dari Yunani, Portugal, Irlandia, Spanyol dan Siprus. UE

⁷ Jason Manolopoulos, *Greece's "Odious" Debt: The Looting of the Hellenic Republic by the Euro, the Political Elite and the Investment Community* (London, United Kingdom: Anthem Press, 2011), 29.

⁸ *Council on Foreign Relations*, "The Eurozone in Crisis."

dan IMF telah membantu beberapa negara tersebut dengan memberikan *Bailout* pada tahun 2011 yaitu Yunani, Irlandia dan Portugal.

Satu tahun setelah ECB meluncurkan program – program untuk membantu Yunani, pada tahun 2016, ECB memulai mengakuisisikan *bailout – bailout* obligasi yang dikeluarkan oleh bank – bank Yunani.⁹ Organisasi darurat Eropa untuk pendanaan bailout, *European Financial Stability Facility* (EFSF) telah mengeluarkan sejumlah 2,5 Miliar Euro, yang kemudian dibeli oleh ECB dari para kreditur Yunani. Langkah yang diambil ECB tadi sangat cepat tanggap, mengingat sebagai Negara *bailout*, Yunani dilarang dalam skema penjualan dan pembelian obligasi pemerintah oleh ECB yang diluncurkan tahun lalu. Tetapi larangan terhadap bank – bank Yunani untuk menjual obligasi EFSF mereka telah diangkat oleh pihak otoritas Eropa. Pencabutan larangan ini memberi jalan bagi ECB untuk membeli obligasi – obligasi / hutang tersebut, menjadikan pembelian tersebut sebagai salah satu langkah stimulus di seluruh *Eurozone*.

Berdasarkan fakta – fakta yang ditemukan oleh penulis, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian mengenai UE sebagai lembaga supranasional memiliki kewajiban membantu negara anggotanya, serta langkah yang diambil badan – badan organisasi dibawah naungan UE dalam mengatasi krisis yang dialami oleh negara anggotanya.

⁹ *Financial Times*, “The ECB is finally helping out Greece,” *Financial Times*, diakses 27 September 2016, <http://www.ft.com/fastft/2016/04/26/the-ecb-is-finally-helping-out-greece/>.

1.2 Identifikasi Masalah

1.2.1 Deskripsi Masalah

Yunani menjadi anggota tetap dari UE pada tahun 1981 setelah menunggu dari tahun 1975, ketika Yunani mendaftarkan negaranya untuk menjadi anggota UE. Masuknya Yunani menjadi anggota UE termasuk dalam *Mediterranean Enlargements*, karena pada saat itu UE sedang mengadakan program perluasan untuk negara anggotanya.¹⁰

Yunani melakukan kesalahan yang sebenarnya juga dilakukan oleh negara anggota lainnya, yaitu memanipulasi sebagian angka – angka data dalam laporan statistik defisit dan hutang Pemerintah Yunani.¹¹ Menurut *European Commission* (EC), permasalahan yang muncul memiliki kaitan dengan kelemahan dan kesalahan dalam statistika serta permasalahan kegagalan dari Yunani sendiri sebagai sebuah lembaga, seperti pemerintahan yang kurang baik dengan tanggung jawab yang kurang antara institusi – institusi negara di Yunani dan juga memiliki keterlibatan dengan kepentingan pribadi dari pejabat negara.¹²

Walaupun negara anggota lainnya juga ada yang pernah melakukan perbuatan tersebut, jumlah angka yang dimanipulasi tidak sebesar yang dimanipulasi oleh Yunani. Setelah Yunani terbebani dengan defisit dan hutang yang

¹⁰Jennifer Rankin, "Greece in Europe: A Short History," *The Guardian*, 3 Juli 2015, bagian *World News*, diakses 7 Oktober 2016, <https://www.theguardian.com/world/2015/jul/03/greece-in-europe-a-short-history>.

¹¹Jennifer Rankin.

¹²*European Commission*, "Report on Greek Government Deficit and Debt Statistics," 2010. *European Commission*, Brussels, hal 4, diakses 7 Oktober 2016, http://ec.europa.eu/eurostat/documents/4187653/6404656/COM_2010_report_greek/c8523cfa-d3c1-4954-8ea1-64bb11e59b3a.

semakin berat, Yunani mendapatkan bantuan *bailout* dari IMF serta negara – negara *Eurozone*. *Bailout* diberikan secara bertahap pada tahun 2010 dan 2012, dengan total mencapai 240 Miliar Euro, dengan konsekuensi Yunani harus melakukan penghematan secara ketat.

Seharusnya, dalam konteks krisis finansial Yunani yang berat dan khususnya dalam konteks kelanjutan paket penanganan krisis ekonomi UE, Yunani menerima kembali *Third Bailout Programme*, sayangnya dengan diadakannya *Third Bailout Referendum*, mayoritas warga Negara Yunani memilih “**TIDAK**” untuk *bailout* ketiga.¹³ Mayoritas dari warga negara Yunani memilih “**TIDAK**” terhadap *bailout* ketiga karena adanya juga desakan dari pihak pemerintah, PM baru Yunani, Alexis Tsipras menyatakan bahwa *bailout* mempermalukan negara Yunani serta dengan memilih tidak, maka Yunani memilih Eropa yang solider dan demokratis.

1.2.2 Pembatasan Masalah

Penelitian ini memiliki fokus untuk menganalisa mengapa pada tahun 2015 Yunani menolak *Third Bailout Programme* yang ditawarkan Uni Eropa dalam upaya mengatasi *sovereign debt crisis* di Yunani. Tahun 2015 dipilih karena pada tahun tersebut diselenggarakan pemilu pada tanggal 25 Januari 2015, kemudian

¹³ *European Commission*, “Report on Greek Government Deficit and Debt Statistics,” diakses 7 Oktober 2016, http://ec.europa.eu/eurostat/documents/4187653/6404656/COM_2010_report_greek/c8523cfa-d3c1-4954-8ea1-64bb11e59b3a.

pelaksanaan referendum pada tanggal 8 Juli 2015. Peneliti memfokuskan penelitian pada faktor politik dan sosial – ekonomi penolakan *Third Bailout Programme* melalui *Third Bailout Referendum* oleh Yunani. Faktor politik terkait dengan pemenuhan janji kampanye PM Alexis Tsipras dan faktor sosial – ekonomi, sisi sosial terkait meningkatnya total pengangguran secara keseluruhan serta jumlah rumah tangga yang terkena dampak dari *austerity measures* yang berkepanjangan dan sisi ekonomi terkait ketergantungan bank – bank Yunani terhadap ELA dan pembatasan penarikan uang tunai.

1.2.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang dipaparkan diatas, maka perumusan masalah yang akan diajukan peneliti untuk mengkaji peran UE dalam *sovereign debt crisis* Yunani pada tahun 2015 adalah **“Mengapa pada tahun 2015 Yunani menolak *Third Bailout Programme* yang diberikan oleh Uni Eropa melalui *Third Bailout Referendum*?”**

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan faktor – faktor yang menjadi dasar penolakan *Third Bailout Programme* melalui *Third Bailout Referendum* tahun 2015. Penelitian ini menganalisis faktor politik dan faktor sosial – ekonomi yang menjadi faktor penolakan melalui *Third Bailout Referendum* sebagai

substantive bargaining agar dapat mengajukan proposal *bailout* yang sesuai dengan keinginan Yunani.

1.3.2 Kegunaan

Penulis berharap penelitian ini memperluas wawasan para mahasiswa dan pengkaji Eropa dan ekonomi politik internasional bahwa tidak semua negara anggota UE memiliki kemampuan yang sama dalam menjalankan integrasi ekonomi.

1.4 Kajian Literatur

Penelitian mengenai Penolakan Yunani terhadap *Third Bailout Programme* UE dalam Upaya Menangani *Sovereign Debt Crisis* tahun 2015 sebelumnya pernah terlebih dahulu dilaksanakan oleh peneliti-peneliti kajian Eropa.

Artikel jurnal pertama ditulis oleh Serdar Öztürk dengan judul “*Effects of Global Financial Crisis on Greek Economy: Causes of Present Economic and Political Loss of Prestige*”.¹⁴ Penulis tersebut membahas mengenai efek dari krisis moneter global yang diawali oleh *Mortgage Crisis* di AS pada tahun 2007. Krisis ini menyebabkan instabilitas pada pasar sehingga menjadi krisis global. Spanyol, Portugal, dan Yunani terkena dampak tersebut. Pada akhir tahun 2009, krisis

¹⁴Serdar Öztürk, “Effects of Global Financial Crisis on Greek Economy: Causes of Present Economic and Political Loss of Prestige,” *International Journal of Managerial Studies and Research (IJMSR)*, 3, no. 6 (Juni 2015), diakses 14 November 2016, <https://www.arcjournals.org/pdfs/ijmsr/v3-i6/4.pdf>.

ekonomi dan politik di Yunani yang mulanya adalah krisis hutang pemerintah, telah menjadi *Eurozone Crisis*.

Garry Jacobs dan Mark Swilling adalah dua pengkaji yang juga pernah mempublikasikan tulisannya dengan judul “*The Greek Financial Crisis – Theoretical Implications*”.¹⁵ Penulis membahas bahwa *Greek Crisis* merupakan lebih dari sekedar krisis ekonomi sebuah negara. Krisis tersebut menjadi symbol dari kebijakan dan teori ekonomi yang dipreskripsikan untuk Yunani. Tidak dapat diselesaikannya krisis tersebut tanpa berada dibawah naungan IMF dan ECB memperlihatkan kejatuhan dari kerangka kebijakan – kebijakan tersebut.

Tulisan lain dibuat oleh George Alogoskoufis dengan judul “*Greece and The Euro: A Mundellian Tragedy*”.¹⁶ Paper tersebut menganalisa dari proses destabilisasi, krisis dan penyesuaian dalam perekonomian Yunani sejak menjadi anggota EU dan kemudian, anggota *Eurozone*. Paper ini membahas empat siklus kebijakan – kebijakan selama 40 tahun terakhir, lalu empat bagian dari tragedi perekonomian Yunani, serta pada bagian akhir membahas cara – cara alternatif kedepannya. Kendala yang muncul dari bergabungnya kedalam *Eurozone* adalah adanya konflik dalam keseimbangan internal dan eksternal perekonomian Yunani.

Artikel jurnal lain, ditulis oleh Akis Kalaitzidis dan Nikolaos Zahariadis dengan judul *Grece’s Trouble with European Union Accession*.¹⁷ Artikel jurnal

¹⁵Garry Jacobs dan Mark Swilling, “The Greek Financial Crisis – Theoretical Implications” | *Cadmus Journal*, diakses 22 November 2016, <http://cadmusjournal.org/article/volume-2/issue-5/greek-financial-crisis-%E2%80%93-theoretical-implications>.

¹⁶George Alogoskoufis, “Greece and the Euro: A Mundellian Tragedy,” t.t., 65.

¹⁷Akis Kalaitzidis dan Nikolaos Zahariadis, “Greece’s Trouble with European Union Accession,” *Cahiers de la Méditerranée*, no. 90 (1 Juni 2015), diakses 5 Juni 2020, <https://journals.openedition.org/cdlm/7951>, 71–84.

tersebut membahas lini masa Yunani dari tahun 1975 hingga tahun 2013 ketika SYRIZA menjadi salah satu partai terbesar setelah PASOK. Selama jangka waktu tersebut, Yunani memiliki permasalahan yang menumpuk. Penulis mendeskripsikan bahwa kegagalan Yunani beradaptasi setelah menjadi anggota UE berasal dari faktor – faktor domestik. Faktor – faktor tersebut meliputi transisi demokrasi Yunani pada tahun 1970-an, politik yang didominasi partai sosialis, kekuasaan penuh partai terhadap negara, dan kepemimpinan Yunani yang tidak mampu untuk memvisualisasikan visi jangka panjang negara sebagai anggota UE.

Topik krisis Yunani juga telah menjadi kajian mahasiswa jurusan HI Universitas Katolik Parahyangan Cornelia Laksmi Dewi Supama dengan judul skripsi “Implementasi *Austerity Measures* sebagai Penanganan Krisis Finansial Yunani”.¹⁸ Dalam skripsi ini, penulis meneliti tentang upaya UE dalam mengatasi krisis finansial Yunani dengan mengimplementasikan paket kebijakan *Austerity Measures*, meliputi *The Welfare State* yaitu mengenai konsep jaminan sosial, *The Labour Market* mengenai regulasi pasar tenaga kerja, serta *Public Administration* mengenai regulasi kinerja administrasi pemerintah Yunani.

Penelitian ini berbeda dengan kajian – kajian sebelumnya karena berfokus pada dua faktor, faktor politik terkait dengan pergantian Perdana Menteri dari pihak politik yang berbeda serta pemenuhan janji kampanye Perdana Menteri terpilih Alexis Tsipras dan faktor sosial – ekonomi, dari sisi sosial terkait dengan jumlah total pengangguran secara keseluruhan dan jumlah rumah tangga yang terkena

¹⁸Cornelia Laksmi Dewi Supama, “Implementasi *Austerity Measures* sebagai Upaya Penanganan Krisis Finansial Yunani,” t.t.

dampak *austerity measures* berkepanjangan. Sisi ekonomi terkait dengan ketergantungan bank – bank Yunani terhadap ELA dan pembatasan penarikan uang tunai.

1.5 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini memakai teori *Enlargement* untuk menjelaskan bergabungnya Yunani ke dalam Uni Eropa dan teori *Liberal Intergovernmentalism* untuk menganalisis posisi negara dalam hubungannya dengan Uni Eropa.¹⁹ Teori *Enlargement* dikembangkan oleh Frank Schimmelfennig dan Ulrich Sedelmeier untuk menjelaskan bergabungnya negara – negara dengan UE.²⁰ *Enlargement* dari UE merupakan salah satu proses politik yang penting bagi UE, *enlargement* dalam UE sendiri tersebar secara acak dalam sejarah mereka, namun pasca berakhirnya perang dingin menjadikan *enlargement* bagian tetap dalam agenda UE. Perluasan organisasi didefinisikan sebagai proses institusionalisasi horizontal yang bertahap dan formal, dari aturan dan norma organisasi. Makna institusionalisasi dari definisi tersebut adalah proses ketika tindakan serta interaksi antar aktor sosial menjadi pola yang normatif. Maka, institusionalisasi horizontal terjadi disaat lembaga tersebar diluar aktor yang memiliki kuasa, yaitu ketika sekelompok aktor yang tindakan dan relasinya diatur oleh norma organisasi, semakin banyak.

¹⁹ *University of Portsmouth*, “Intergovernmentalism & Liberal Intergovernmentalism,” European Studies Hub, diakses 20 November 2019, <http://hum.port.ac.uk/europeanstudieshub/learning/module-4-theorising-the-european-union/3-intergovernmentalism-liberal-intergovernmentalism/>.

²⁰ Frank Schimmelfennig dan Ulrich Sedelmeier, ed., *The Politics of European Union Enlargement: Theoretical Approaches*, First (USA, Canada: Routledge, 2005), 3–4.

Enlargement UE berfokus pada tiga dimensi perluasan, yaitu (i) *Applicants' enlargement politics*; (ii) *Member – state enlargement politics*; (iii) *EU enlargement politics*.²¹ Namun, dalam penelitian ini, peneliti menemukan bahwa dimensi 1 dan 2 lebih sesuai untuk menganalisa latar belakang masuknya Yunani kedalam Uni Eropa. Dimensi satu, *applicants' enlargement politics*, menekankan mengapa dan di dalam kondisi apakah pihak luar tersebut menginginkan perubahan dalam relasi kelembagaan mereka dengan organisasi regional. Dimensi kedua, *member – state enlargement politics*, menekankan dalam kondisi apakah, negara anggota dari organisasi regional mendukung atau menolak perluasan ke negara pemohon.

Liberal Intergovernmentalism merupakan teori yang berusaha mencari penjelasan akan beragamnya evolusi integrasi regional. Teori ini berargumen bahwa integrasi tidak dapat dijelaskan dengan satu faktor saja, melainkan berusaha untuk saling menghubungkan teori – teori serta faktor – faktor lain menjadi sebuah pendekatan koheren tunggal yang layak untuk menjelaskan integrasi dari waktu ke waktu. Beberapa karakteristik LI yang membuatnya berkontribusi dalam posisinya sebagai teori dasar. Pertama, negara merupakan aktor penting dalam *international anarchy*.²² Negara berusaha untuk mencapai tujuan mereka melalui negosiasi dan *bargaining* antar pemerintah, bukan melalui otoritas yang tersentralisasi. LI menyatakan fakta bahwa lembaga seperti UE, negara anggotanya-lah yang

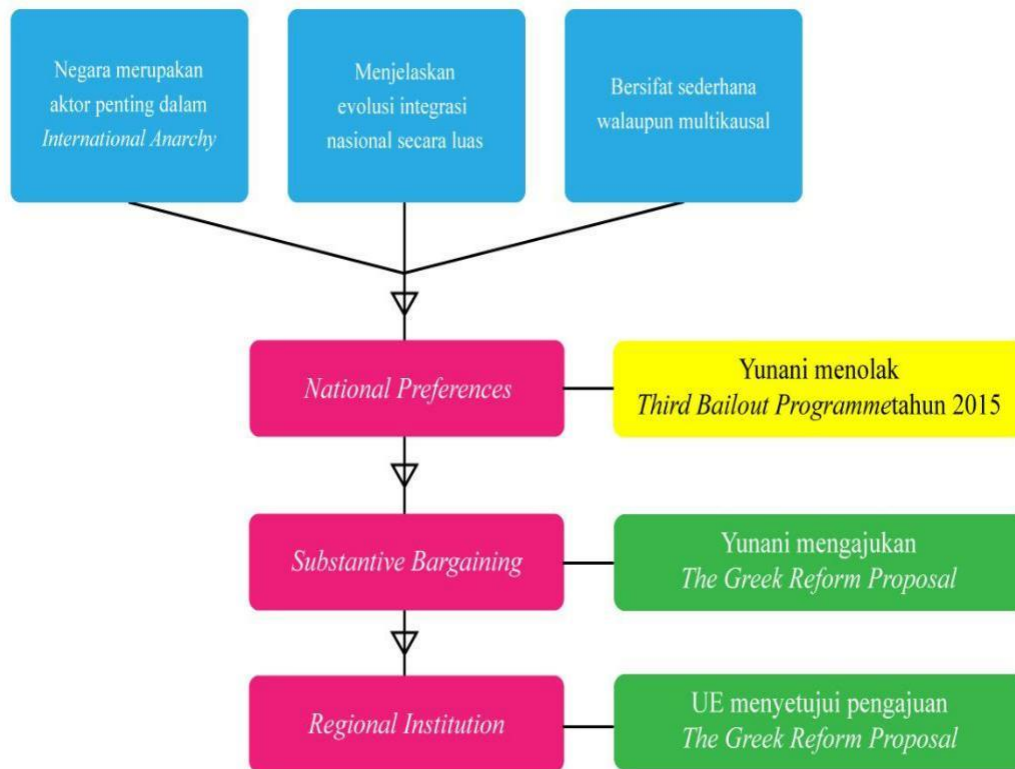
²¹ Frank Schimmelfennig dan Ulrich Sedelmeier, 6–7.

²² Andrew Moravcsik dan Frank Schimmelfennig, “Liberal Intergovernmentalism,” dalam *European Integration Theory, Second Edition* (UK: Oxford University Press, t.t.), 67–68, diakses 17 Februari 2020.

memegang kuasa dalam perjanjian dan menjalankan kemampuan *decision-making power* mereka, serta negara anggota memiliki legitimasi politik. Kedua, LI merupakan *grand theory* yang menjelaskan secara luas dari evolusi integrasi regional. LI bukanlah sebuah teori sempit dari aktivitas politik yang tunggal, berargumen bahwa integrasi tidak dapat dijelaskan hanya dengan satu faktor saja, tetapi dengan menghubungkan beberapa faktor menjadi sebuah pendekatan tunggal yang koheren, untuk menjelaskan integrasi dari waktu ke waktu. Ketiga adalah *Liberal Intergovernmentalism* bersifat *Parsimonious*, LI tetap sederhana walaupun multikausal, LI menolak penjelasan monokausal, LI berargumen bahwa diperlukan minimal sebanyak tiga teori yang tersusun dalam bentuk *multistage* (yaitu *Preferences*, *Bargaining* dan *Institutions*) diperlukan untuk menjelaskan integrasi. Keputusan yang diambil untuk bekerja sama secara internasional dapat dijelaskan dalam tiga tahap *framework*:²³ (1) *National Preferences*, negara menentukan preferensinya; (2) *Substantive Bargaining*, negara ‘tawar – menawar’ yang sesuai keadaan (substentif); lalu menyesuaikan atau membuat (3) *Regional Institution*, untuk mengamankan dan berkomitmen atas hasil tersebut dalam ketidakpastian yang ada dalam politik di masa mendatang.

²³ Andrew Moravcsik dan Frank Schimmelfennig, 68–69.

Gambar 1.1 Ilustrasi Liberal Intergovernmentalism



Sumber: *European Integration Theory* oleh Andrew Moravcsik dan Frank Schimmelfennig²⁴

Seperti ditunjukkan dalam Gambar 1.1, menurut teori LI, konsep pertama yang penting adalah *National Preferences*. Konsep *National Preferences* dalam LI, dimana LI tetap memperlakukan negara sebagai aktor walaupun kadang dalam

²⁴ Andrew Moravcsik dan Frank Schimmelfennig, "Liberal Intergovernmentalism," dalam *European Integration Theory*, Third Edition (UK: Oxford University Press), diakses 17 Februari 2020, <https://www.princeton.edu/~amoravcs/library/Moravcsik%20Schimmelfennig%20LI%202018%20Reduced.pdf>.

pembentukan *preference* banyak melibatkan aktor domestik.²⁵ LI beranggapan bahwa *political bargaining* domestik, diplomasi dan representasi akan menghasilkan fungsi *preference* yang konsisten. Tujuan dasar dari *state preferences* tidak sama dan tidak tetap, karena tiap negara memiliki *preference* yang berbeda dan didalam sebuah negara, tergantung dari lintas waktu dan isu – isu yang ada.

Konsepsi kedua yang penting dalam kerangka teori LI adalah *Substantive Bargaining*. Di dalam konsep *substantive bargaining*, LI menggunakan *bargaining theory of international cooperation* untuk menjelaskan sifat substantif dari hasil negosiasi – negosiasi internasional antar negara dengan perbedaan preferensi, dikarenakan perbedaan *preferences* antar negara membuat titik temu yang sulit.²⁶

Keinginan dan kemampuan negara – negara untuk bekerja sama mengalami kelemahan karena adanya *bargaining* yang sulit akibat dari perbedaan kepentingan bersama. Dalam perihal ini maka *bargaining theory* memiliki argumen bahwa hasil dari negosiasi internasional, setiap munculnya konteks kerjasama tergantung dari *relative bargaining power* para aktor. *Bargaining power* di dunia politik internasional dberasal dari banyak faktor, LI menyatakan pendapatnya (dalam konteks UE) adanya *asymmetrical interdependence*, yaitu ketidakmerataan distribusi keuntungan dari perjanjian tertentu dan ketidakmerataan informasi perihal perjanjian dan *preferences*, kedua hal tersebut memiliki peran penting. Dapat dikatakan, para aktor yang tidak membutuhkan kesepakatan spesifik (relatif

²⁵ Andrew Moravcsik dan Frank Schimmelfennig, 66.

²⁶ Andrew Moravcsik dan Frank Schimmelfennig, “Liberal Intergovernmentalism,” t.t., 70–71.

terhadap situasi yang sudah ada), adalah yang paling mampu untuk ‘mengancam’ aktor lain yang belum bekerjasama dan ‘memaksa’ mereka untuk membuat konsesi/kesepakatan. Sedangkan, untuk para aktor yang memiliki informasi lebih tentang *preferences* aktor lainnya dan tentang cara kerja dari lembaga tersebut, dapat ‘memanipulasi’ atau ‘membentuk’ hasil tersebut sesuai untuk keuntungan mereka.

LI menjelaskan efisiensi dari *bargaining* dan pendistribusian keuntungan dari kerjasama yang substantif antar negara, di mana *national preferences* nya sudah diketahui sebelum proses bargaining dilakukan. Menurut Federalis dan Neo Fungsionalis dalam negosiasi terdapat kaum *Ideational Entrepreneurs* yang memiliki ide, informasi, prestise ataupun kontak yang lebih baik sehingga mereka dapat mempengaruhi pemerintah nasional. Namun sebaliknya, LI beragumen bahwa kaum *Ideational Entrepreneurs* tersebut tidak diharuskan untuk mencapai titik kesepakatan yang efisien antarnegara, karena justru mereka jarang atau tidak memiliki keahlian ataupun informasi yang negara tidak memilikinya.

Berdasarkan penelitian Moravcsik di Eropa, *cost* negosiasi termasuk rendah, relatif terhadap *substantive benefits* yang negara terima dari kerjasama mereka. Ide serta informasi sangat banyak dan didistribusikan secara simetris (*symmetrically*) antar negara, dan sedikit sekali bukti yang menunjukkan negara kurang mendapat informasi atau tidak memiliki informasi yang tepat untuk bertindak seperti aktor lainnya. Dengan adanya *national preferences* yang positif, negosiasi antarnegara yang ter – desentralisasi dalam UE, menghasilkan hasil yang efisien. Dan dalam kasus – kasus tertentu, seperti *Single European Act 1986*, peran

Supranational Entrepreneurs diperlukan agar menghasilkan hasil *efficient bargaining*.

Konsepsi ketiga adalah *Regional Institution*. Konsep *regional institution* didalam LI, dijelaskan dengan *Regime Theory* untuk pembentukan institusi internasional.²⁷ *Regime theory* ini menganggap institusi internasional sebagai alat untuk mengatasi hal – hal yang tidak diinginkan, tak terduga dan, untuk konsekuensi yang tidak diinginkan, yang timbul ketika negara memutuskan untuk mengkoordinasikan kebijakan/peraturan mereka. Dalam *regime theory*, institusi – institusi internasional menjadi sesuatu yang membantu negara – negara bekerja sama untuk mencapai hasil kolektif yang unggul dalam mengurangi *transaction cost* negosiasi – negosiasi internasional selanjutnya untuk mengimplementasikan dan menegakkan dan memperluas persjanjian sebelumnya yang sudah ada. *Regime theory* membantu dalam penyebaran arus informasi yang mencegah ketidakpastian negara akan *preferences* dan strategi negara lainnya. Negara sendiri yang mengatur persebaran *benefit* yang diperoleh dari *bargaining* sebelumnya serta mengurangi biaya yang untuk mengkoordinasikan kegiatan mereka, memonitor aktivitas negara lainnya, mengimplementasikan lebih lanjut kesepakatan yang sudah diambil dan memberikan sanksi secara kompak untuk yang melanggar. Peraturan yang terpusat membantu untuk mengatasi permasalahan yang berasal dari kelalaian. *Regime theory* menyatakan bahwa perbedaan permasalahan kerjasama yang *issue – specific*

²⁷ Andrew Moravcsik dan Frank Schimmelfennig, 72–73.

menghasilkan perbedaan bentuk institusi/lembaga, bervariasi dilihat dari tingkat keparahan konflik distribusi, permasalahan penegakkan, dan ketidakpastian dari *preferences* negara lain serta keadaan masa depan dunia.

Selama diamati Moravcsik sepanjang sejarah UE, hingga sejauh manakah anggota UE benar – benar menyatukan dan memberikan kewenangan, mencerminkan keragaman yang menjadi dasar dalam kekhawatiran '*issue-specific*' dari pemerintah negara, yaitu mengenai keinginan dan kemampuan untuk memenuhi kesepakatan *substantive bargain* yang sudah dicapai, di masa depan (antara dalam bentuk penegakan yang ketat atau pendalaman lebih lanjut dari *bargain*). Mayoritas dari prosedur – prosedur institusional dalam UE melakukan lebih dari sekedar menentukan norma, standar, dan prosedur yang hanya memungkinkan untuk penyelarasan, *bargaining*, dan menegakkan kebijakan yang mudah diprediksi.

LI menggunakan *Game Theory* untuk melihat bagaimana negara melakukan koordinasi dengan aktor lain dalam mewujudkan kepentingan nasionalnya. LI mengatakan bahwa pemerintah memberikan kewenangannya kepada *decision-making forum* yang umum atau memberikan kewenangannya kepada institusi – institusi di UE (termasuk juga untuk *standard – setting decisions*) sejauh yang diperlukannya untuk mengurangi *cost* negosiasi hingga mencapai solusi bersama. Memberikan kewenangan yang lebih lanjut juga jarang terjadi, misalnya dalam penggunaan *Qualified Majority Voting (QMV)*, *Commission right of proposal*, *the Commission Agricultural Policy (CAP)*, wewenang *European Central Bank (ECB)*, mandat negosiasi *European Commission (EC)*, kekuatan ajudikasi dari *European*

Court of Justice, dan sentralisasi fiskal Eropa. LI berpendapat bahwa pemberian kewenangan tersebut ditujukan untuk mengatur “*Prisoner’s Dilemmas*” di dalam *game theory*, dimana pemerintah memiliki insentif yang mudah ditebak untuk mangkir dari atau tidak melakukan pelaksanaan dan penegakkan dari perjanjian yang sudah dicapai. Dalam UE sendiri, memberikan kewenangan kedaulatan dalam institusi yang *semi – autonomous decision – making*, tidak menjadi penentu dari sumber komitmen negara.

UE memiliki instrumen yang lebih lemah untuk kekuasaan negara dan kurangnya kapasitas mendasar untuk melaksanakan komitmen daripada negara anggota yang paling terdesentralisasi. Misal di beberapa bidang tertentu, kebijakan perdagangan dan kebijakan fiskal – mayoritas aturan tersebut dilaksanakan, dikendalikan dan ditegakkan oleh pejabat negara. UE memiliki kapasitas fiskal yang kecil (2% dari pengeluaran publik Eropa), administrasi yang kecil (hampir setara kota Eropa berpenduduk 1 juta orang), pengadilan yang menyertakan sistem peradilan dan politik nasional, tidak ada unsur paksaan, legitimasi ideologi independen yang sedikit, serta sedikitnya institusi yang otonom. UE sebagai sebuah sistem yang fleksibel dan terdesentralisasi, menghasilkan kooperasional, kepatuhan dan perkembangan yang tinggi dengan menggunakan *domestic commitment mechanisms*. Dalam semua teori liberal dalam hubungan internasional, hal yang menjadi jaminan dasar irreversibilitas koordinasi kebijakan, berada pada perubahan dan adaptasi dari *preferences* domestik (serta antar negara) dan institusi itu sendiri, bukan dari pembebanan norma kelembagaan eksternal. Perkembangan peningkatan komitmen dari waktu ke waktu dapat muncul dengan memberikan wewenang

kepada eksekutif nasional/negara, memperkuat kehakiman nasional, atau memperkuat kelompok domestik yang pro kebijakan melawan kelompok domestik lain yang memingkatkan ketidakpatuhan. Dengan cara – cara lainnya, institusi secara efektif dapat membantu menghilangkan isu – isu akibat dari pengaruh politik domestik, yang kemungkinan dapat meningkatkan ketidakpatuhan jika tingginya *costs* untuk aktor domestik.

Konsep *Sovereign Debt Crisis* merupakan konsep yang sangat penting dalam penelitian ini. *Sovereign Debt* atau yang dikenal sebagai utang pemerintah ini merupakan utang pemerintah pusat yang diterbitkan oleh pemerintah negara untuk mendanai perkembangan dan pertumbuhan negara.²⁸ Utang pemerintah ini biasanya dalam mata uang asing. Pertimbangan investor untuk memberikan investasi utang negara tersebut diambil dari rating kredit negara penerbit utang, untuk menilai stabilitas negara tersebut. Utang pemerintah dibuat dalam menerbitkan surat berharga dan meminjam obligasi dan tagihan pemerintah. Jika negara memiliki rating yang kurang layak kredit, maka akan meminjam langsung kepada organisasi internasional seperti *World Bank*, IMF dan lembaga sejenis. Negara dapat mengalami kesulitan membayar jika adanya kerugian akibat perubahan nilai tukar mata uang dan penilaian yang terlalu optimis untuk pembayaran utang dari proyek atau program yang didanai utang. Kreditur tidak dapat menyita aset – aset pemerintahan dalam kesulitan membayar, namun langkah yang diambil adalah renegotiasi persyaratan utang.

Sovereign Debt dapat berupa

²⁸James Chen, “Sovereign Debt Definition,” Investopedia, diakses 27 Februari 2020, <https://www.investopedia.com/terms/s/sovereign-debt.asp>.

utang internal dan utang eksternal. Utang tersebut dikategorikan sebagai internal jika kreditur tersebut berasal dari dalam negeri, sedangkan jika krediturnya dari luar negeri maka dikategorikan sebagai utang eksternal atau utang luar negeri. Jangka waktu jatuh tempo pembayaran utang pemerintah diklasifikasikan menjadi *Short – Term Debt* dan *Long – Term Debt*. *Short – Term Debt* adalah untuk utang yang berlangsung selama kurang dari setahun dan *Long – Term Debt* untuk utang yang berlangsung lebih dari sepuluh tahun.

Sovereign Debt Crisis terjadi saat negara tidak mampu membayar utang – utangnya.²⁹ Awal munculnya krisis ini dimulai ketika negara tidak dapat mendapatkan pinjaman dengan suku bunga rendah karena kekhawatiran investor bahwa negara tidak mampu membayar obligasi, sehingga menjadi gagal bayar utang. Kekhawatiran investor membuat mereka memerlukan *yield* (tingkat pengembalian investasi sebagai persentase dari jumlah investasi awal) yang semakin tinggi untuk mengimbangi resiko. Semakin *yield* tinggi, semakin tinggi biaya negara untuk membiayai kembali *sovereign debt* – nya. Seiring waktu, negara tidak mampu untuk terus berguling utang, sehingga akhirnya terjadi gagal bayar.

Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut, penelitian ini pertama mendeskripsikan masuknya Yunani ke dalam UE dengan perspektif *enlargement* hingga situasi Yunani menghadapi krisis finansial dengan memakai konsepsi *sovereign debt crisis*. Faktor – faktor penolakan Yunani akan dianalisis dengan

²⁹James Chen.

menggunakan teori *liberal intergovernmentalism*, konsepsi *national preference*, konsepsi *substantive bargaining*, dan konsepsi *regional institution*.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Metode

Penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam mengkaji peran UE dalam *Sovereign Debt Crisis* Yunani adalah metode kualitatif.³⁰ Menurut Creswell, metode kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk mendalami serta memahami permasalahan dengan menggunakan pertanyaan dan analisis data. Metode kualitatif sendiri menggunakan sumber data dari teks dan gambar untuk penulisan penelitian. Metode kualitatif dipilih karena sesuai dengan pandangan Creswell, yaitu memiliki karakteristik *researcher as a key instrument*, peneliti mengumpulkan sumber data dari menganalisis dokumen dan peneliti adalah satu – satunya yang mengumpulkan informasi.

1.6.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian kualitatif yang digunakan adalah *case study*, dimana peneliti menganalisis lebih dalam suatu kasus dengan pembatasan.³¹ Pembatasan tersebut bertujuan agar informasi yang terkumpul lebih terperinci. Dalam penelitian

³⁰John W. Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, Fourth (USA: SAGE Publications, t.t.).

³¹John W. Creswell.

kualitatif, penggunaan sumber data visual seperti gambar dan tabel disajikan secara deskriptif dalam jenis penelitian *case study*.

1.6.3 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini mengumpulkan data yang diperoleh dari Buku, Jurnal, Artikel Berita, Laporan Resmi (EU, ECB, EC, IMF), dan Lembaga Kenegaraan Resmi (*Ministry of Finance, Ministry of Interior*) untuk memperkuat data empiris yang menjadi dasar analisis penelitian.

1.7 Sistematika Pembahasan

Rencana penulisan skripsi ini ditata dalam empat bab, dengan masing – masing bab memiliki sub bab dan sistematika tersendiri.

Bab I: Pendahuluan

Pada bab ini, penulis memaparkan dasar penelitian yang mencakup latar belakang pembentukan *Economic and Monetary Union* (EMU) yang melancarkan integrasi ekonomi dengan *Single Market* berjalan dengan sempurna dan permasalahan yang muncul dari pelaksanaannya. Penulis memaparkan alasan munculnya penolakan *Third Bailout Referendum*. Sumber literatur seperti buku, jurnal, artikel dan data resmi dari sumber terkait yang menjadi acuan penulis dijelaskan dalam bab ini. Teori yang menjadi dasar kerangka penelitian juga dipaparkan dalam bab ini sebagai dasar yang penting dalam analisis yang dilakukan penulis di bab tiga.

Bab II: Keanggotaan Yunani di Uni Eropa dan *Sovereign Debt Crisis* Yunani

Pada bab ini penulis mendeskripsikan sejarah Yunani bergabung menjadi anggota UE serta alasan – alasan mereka bergabung. Analisa bergabungnya Yunani menjadi anggota UE dianalisa dengan perspektif *Enlargement*, dengan dimensi *applicant enlargement politics* untuk menganalisa alasan politik Yunani bergabung dengan UE dan dimensi *member – state enlargement politics* untuk menganalisa alasan ekonomi Yunani bergabung dengan UE .Selanjutnya penulis memaparkan perekonomian Yunani dari beberapa bidang (moneter, perdagangan, pariwisata, *labour market* dan pertumbuhan ekonomi) sebelum dan sesudah menjadi anggota UE. Selanjutnya, penulis juga menjelaskan kronologi terjadinya *Sovereign Debt Crisis* Yunani. Bagian terakhir menjelaskan respon UE dalam menangani krisis tersebut.

Bab III: Faktor Penolakan *Third Bailout Programme* oleh Yunani pada *Third Bailout Referendum* tahun 2015.

Pada bab ini dideskripsikan faktor – faktor yang menjadi alasan penolakan *Third Bailout Programme* pada *Third Bailout Referendum* pada tahun 2015. Faktor pertama adalah faktor politik, dan faktor kedua adalah faktor sosial – ekonomi. Analisis kedua faktor tersebut menggunakan teori *Liberal Intergovernmentalism* sebagai dasar dan konsepsi *national preferences*, *substantive bargaining* dan *regional institution* untuk menganalisis penolakan *Third Bailout Programme* melalui *Third Bailout Referendum* pada tahun 2015.

Bab IV: Kesimpulan

Pada bab ini, penulis memaparkan kesimpulan dari hasil penelitian dan memaparkan jawaban dari pertanyaan penelitian.

